



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KAMIS, 17 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**DIRWAN CS TERSANGKA**

**Terima Fee  
Proyek 15 %**

**JAKARTA, BE** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan (BS) Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menetapkan istri Dirwan, Hendrati alias Heni sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status

penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, tadi malam (16/5).

Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya. Pertama, Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati.

► *Baca Dirwan ... Hal 15*

Menurut Basaria, Nursilawati merupakan keponakan Dirwan Mahmud. Terakhir, KPK menetapkan Juhari, seorang kontraktor yang sudah biasa menjadi rekanan di Pemkab Bengkulu Selatan.

Basaria mengatakan, Dirwan, istrinya dan Nursilawati diduga menerima suap dari Juhari. Menurut Basaria, ketiganya diduga menerima suap sebesar Rp 98 juta. Uang tersebut diduga sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan oleh Juhari.

Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b

atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Juhari selaku pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Basaria mengatakan sangat prihatin dengan penangkapan ini. Pasalnya, Tim pencegahan KPK telah mendampingi 10

pemerintahan kabupaten dan kota dan provinsi Bengkulu dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa. Namun kenyataannya kepala daerah masih dapat mengatur proyek dan mengambil keuntungan darinya. "KPK juga menduga ada indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung," katanya.

Keprihatinan lainnya adalah KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut

mendukung dalam pembuatan ini dan istri dan juga keponakan bersama sama menerima uang.

"Kali ini jumlah yang diamankan mungkin tidak terlalu besar, namun dugaan komitmen fee 15 persen yang jika dilakukan terhadap setiap proyek dalam APBD dalam setahun tentu angkanya bukan angka kecil," katanya.

Basaria mengatakan, KPK sering mengingatkan kepala kepala daerah agar amanah dalam mengemban tugasnya dan semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. "Bukan mengambil Keuntungan dari jabatannya," katanya. (001/jp)